

EKSPLORASI PERGESERAN NILAI PRAKSIS PANCASILA PADA MASYARAKAT URBAN KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Mustari*, Najamuddin, Masliana

Universitas Negeri Makassar

***Email: mustari6508@unm.ac.id**

ABSTRACT

This research aims to (1) To find out what are the shifts in the value of Pancasila praxis in the urban community of Mamuju Regency. (2) To find out what obstacles are in implementing praxis values in the urban community of Mamuju Regency. This study uses a qualitative research approach from the type of descriptive research. The types and sources of data are primary and secondary data obtained from the results of interviews, observations and documentation. The informants in this study are the people of Mamuju District. The results of the study show that (1) The shift in praxis values in the urban community of Mamuju District can be seen from the change in community orientation towards mutual cooperation activities, a sense of kinship and social solidarity. Urban society tends to be more individual and only focuses on life goals. (2) Internal and External Obstacles in the Implementation of Pancasila Praxis Values. The internal constraints of urban society can be seen from the lack of understanding and deep internalization of the application of Pancasila values among the community, especially the younger generation, namely students and students as immigrants to continue their education. So that the impact can affect the loss of trust and strength of the value of Pancasila itself.

Keywords: urban society, shift, research, government

PENDAHULUAN

Pancasila selaku *core philosophy* atau dasar negara bangsa Indonesia dijadikan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah mengungkapkan pancasila sebagai jiwa bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan pondasi ideologi Pancasila mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. (Ritonga, 2024). Kehadiran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara membawa keistimewaan bahwa nilai Pancasila harus di jadikan landasan pokok terhadap aturan, landasan fundamental bagi pengaturan masyarakat serta penyelenggaraan negara. Pancasila yang di terima sebagai dasar

negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah di uji kebenaran, kemampuan dan kesaktiaannya, Sehingga tidak ada yang mampu memisahkan pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Pancasila bukanlah sesuatu yang direncanakan secara singkat oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1945, Melainkan telah melalui proses panjang dan dimatangkan oleh perjuangan bangsa. Dengan melihat pengalaman dari bangsa -bangsa lain mengenai kemerdekaannya serta dengan diilhami sendiri oleh masyarakat kita dan gagasan-gagasan besar para cendekiawan bangsa kita. Karena pancasila telah berakar didalam kepribadian bangsa maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Dalam sistem hukum Indonesia, pancasila juga memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Hal itu dapat dilihat dari posisi pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang dasar negara Indonesia tahun 1945. Pancasila menjadi landasan atau fondasi bagi seluruh peraturan perundangan -undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap peraturan perundangan harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila. Salah satu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah dengan di tetapkannya ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Tap MPRS ini secara tegas menyatakan bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Ketetapan ini merupakan produk hukum tertinggi pada masa Orde Baru dan menjadi hukum yang kuat bagi kedudukan pancasila. Demikian halnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini menjelaskan bahwa keseluruhan hukum, termasuk didalamnya peraturan perundangan, harus didasarkan pada Pancasila.

Peraturan perundangan-undangan yang di maksud meliputi Undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Presiden), peraturan daerah (Perda), serta bentuk peraturan lainnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Dengan demikian hakikat dari keberadaan pancasila bersifat komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila bersifat universal dan abadi namun juga sangat relevan dengan konteks sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan dari sudut pandang yuridis, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Keberadaan pancasila dalam filsafat memberikan landasan nilai yang mendalam. Sedangkan secara yuridis memberikan bentuk yang konkret dalam sistem hukum. Dalam sisi hakikat dan

yuridis Pancasila tercermin dalam nilai fundamental, nilai instrumental dan nilai praksis Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila terbagi atas tiga yakni Nilai dasar atau fundamental, Nilai instrumental dan Nilai praksis. Nilai fundamental Pancasila adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat dan bangsa dan negara Indonesia. Nilai dasar dalam Pancasila adalah asas-asas yang di terima sebagai dalil yang sedikit banyak bersifat mutlak dan tidak dapat di pertanyakan lagi. Nilai yang terdapat dalam dasar Pancasila adalah Nilai ketuhanan, Nilai kemanusiaan, Nilai persatuan, Nilai kerakyatan dan Nilai keadilan. Pancasila adalah dasar negara yang merupakan pernyataan ringkas daripada isi jiwa bangsa Indonesia. Nilai juga dimaknai sebagai keyakinan mengenai cara bertingkah laku yang bersumber pada sistem nilai seseorang, bahkan masyarakat, tentang apa yang patut di lakukan dan dijadikan sebagai prinsip dalam hidupnya (Mulyana, 2004).

Setelah puluhan tahun Pancasila lahir sebagai pandangan hidup bangsa, baik bangsa Indonesia maupun seluruh bangsa yang ada didunia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Masuknya globalisasi baik bangsa Indonesia maupun bangsa lain seakan tidak mampu memilah dampak baik dan buruknya. Begitu juga dengan masyarakatnya. Masyarakat perkotaan biasanya cenderung mengalami arus urbanisasi dan globalisasi (Chairiyah, 2020). Partisipasi aktif masyarakat sipil berperan penting dalam mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun perubahan sosial dan dinamika sering mengakibatkan terjadinya orientasi nilai dalam masyarakat (Nugroho, 2021).

Adanya perkembangan globalisasi salah satunya juga berdampak besar pada perkembangan teknologi. Hal ini tidak bisa di pungkiri lagi untuk saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai kalangan sudah sangat marak. Tak terkecuali dengan Indonesia juga merasakan dampak tersebut, dimana persebaran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat. Dukungan perangkat gadget dan internet seolah menjadi kebutuhan penting masyarakat saat ini. Sehingga informasi apapun di dapatkan dengan mudah dimanapun dan kapanpun.

Tentu saja terdapat sisi positif dan negatif dari penggunaan teknologi di masa sekarang ini, sisi positif kita dapat bertukar informasi secara cepat menggunakan jejaring sosial yang sudah marak di gunakan, semua informasi juga tersedia kita hanya menuliskan sesuatu yang ingin di cari dan begitu mudah mendapatkan jawabannya. Selain sisi positif ada juga sisi negatifnya dari penggunaan internet, masyarakat Indonesia rata-rata tidak dapat menyaring hal-hal negatif yang ada diinternet, termakan berita palsu atau *hoax* dan mudah terprovokasi.

Nilai-nilai Pancasila hendaknya di jadikan pedoman bagi warga negara dalam kehidupannya baik dalam hal berpikir, bertindak maupun berperilaku sehingga akan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, damai dan sejahtera. Partisipasi masyarakat semacam ini mendorong keterlibatan semua pihak sehingga keputusan yang di dapatkan mencerminkan aspirasi dan memperkuat kohesi sosial. (Kaharuddin, 2024) begitu halnya dengan masyarakat urban yang merupakan bagian dari kelompok sosial masyarakat yang mendiami hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu masyarakat urban merupakan masyarakat para pendatang yang kebanyakan belum memiliki tempat tinggal tetap di kota. Kebanyakan diantara mereka tinggal atau menempati di rumah kontrakan/kos, perumahan (*cluster*) dan menumpang di rumah keluarga. Mereka ini tinggal untuk sementara waktu ataupun menetap dalam waktu cukup lama namun sebagian besar tidak menetap selamanya dengan alasan karena: tuntutan pekerjaan, sekolah/kuliah, mengikuti orang yang bertugas, ikut suami/istri, dan lain-lain. Namun ada juga sebagian masyarakat urban tetap memilih untuk tinggal dan menetap dalam jangka waktu lama karena alasan tertentu karena pekerjaan, ikatan perkawinan dan transmigrasi.

Namun pada kenyataannya nilai gotong royong yang selama ini merupakan ciri khas masyarakat Indonesia, kini semakin tergerus di tengah pesatnya arus urbanisasi. Pergeseran nilai ini karena di pengaruhi oleh berbagai faktor misalnya sifat individualisme yang semakin meningkat sehingga hanya fokus pada diri sendiri dan adanya persaingan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu masyarakat urban terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga sulit membangun rasa kebersamaan. Hal lain yang mengakibatkan tergerusnya gotong royong dalam masyarakat urban adalah tingkat mobilitas tinggi sehingga tidak adanya ikatan sosial yang kuat dengan lingkungan sekitar. Dalam era modern terjadi pergeseran nilai persatuan dan gotong royong akibat derasnya arus individualisme dan globalisasi (Hidayat, A., 2021).

Kecamatan Mamuju dipilih sekaligus ditetapkan sebagai lokasi penelitian (*setting*) dengan pertimbangan: pertama, Mamuju sebagai ibu kota sekaligus pintu gerbang memasuki propinsi Sulawesi Barat yang merupakan pemekaran propinsi Sulawesi Selatan (semenjak tahun 5 Oktober 2004). Selain itu indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui komponen kesehatan dan pendidikan. Menurut data statistik di kecamatan Mamuju angka harapan hidup meningkat dari tahun 2020 hingga 2023 sedangkan indeks pendidikan pun juga di ukur melalui angka melek huruf meningkat dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini bertempat di kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat urban yang tinggal di Mamuju dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dalam pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi ideologi Pancasila terus mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Menurut Ritonga dalam artikelnya “efforts to revitalize Pancasila Values in Building” bahwa pergeseran nilai Pancasila dalam masyarakat urban merupakan fenomena yang perlu diantisipasi dengan serius. Artikel tersebut menyoroti bahwa urbanisasi dan modernisasi berkontribusi pada perubahan orientasi masyarakat. Salah satu perubahan yang signifikan terjadi pada masyarakat urban di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Pergeseran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi fenomena yang menarik untuk dieksplorasi di tengah modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Pergeseran ini tidak selalu berarti hilangnya nilai Pancasila, tetapi lebih kepada adaptasi atau transformasi dalam bentuk baru. Dengan fokus pada konteks transformasi sosial, ekonomi dan budaya, analisis pembahasan ini diuraikan berdasarkan hasil penelitian yang mendalami perilaku, pola interaksi, serta perubahan nilai dalam aspek kehidupan masyarakat meliputi:

1) Konteks Urbanisasi dan Implikasi Individualistis

Mamuju sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Sulawesi Barat mengalami perkembangan pesat yang dipicu oleh urbanisasi. (Chairiyah, 2020) dalam penelitiannya berjudul pergeseran nilai dalam komunitas urban, masyarakat perkotaan cenderung mengalami arus urbanisasi dan globalisasi. Urbanisasi berorientasi kolektif bergeser kearah individualisme, dimana interaksi sosial sebelumnya berbasis pada kebersamaan dan solidaritas komunal, semakin di gantikan oleh pola-pola hubungan yang pragmatis dan efisiensi pribadi. Perubahan ini mempengaruhi pola kehidupan masyarakat tradisional dan menggiring pada pembentukan masyarakat urban dengan karakteristik baru. Tentu hal ini akan menyebabkan terjadinya interaksi budaya yang kompleks, dengan implikasi signifikan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Proses urbanisasi memunculkan tantangan seperti meningkatnya kompetisi ekonomi dan tuntutan modernisasi.

Masyarakat yang sebelumnya mengutamakan kerjasama, kerja bakti mulai beradaptasi dengan kehidupan individualistis. Perubahan ini terlihat jelas dalam pola kerja, interaksi sosial dan struktur keluarga yang akhirnya turut mempengaruhi penerapan nilai-nilai praksis Pancasila dalam kehidupan sehari – hari. Urbanisasi mendorong perubahan nilai sosial yang signifikan, namun penerapan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila harus tetap menjadi acuan utama. Keadilan sosial tidak hanya berarti pemerataan ekonomi, tetapi juga mencakup akses yang adil terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat, termasuk di kawasan urban dan rural (Kusuma, 2022).

2) Kepedulian Sosial dan Toleransi Beragama

Nilai praksis pancasila adalah perwujudan nilai-nilai pancasila dalam sikap dan tindakan nyata (M.S.Kaelan, 2003). Partisipasi aktif masyarakat sipil berperan penting dalam mewujudkan nilai-nilai praksis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan sosial dan dinamika perkotaan seringkali mengakibatkan orientasi nilai. Begitu halnya implementasi dalam nilai kemanusiaan dan toleransi beragama dalam masyarakat urban Mamuju mengalami tantangan di tengah keberagaman agama dan budaya yang semakin kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat urban cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan, meskipun terdapat beberapa kasus yang menunjukkan potensi konflik.

Di sisi lain, acara keagamaan yang bersifat kolektif seperti perayaan hari besar agama tetap diadakan dan menjadi momen penting untuk memperkuat rasa kebersamaan. Toleransi dan kerukunan masih terlihat, tetapi partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan menurun karena masyarakat lebih fokus pada urusan pribadi dan pekerjaan. Upaya adaptasi perlu dilakukan agar nilai-nilai Pancasila seperti toleransi dan keadilan sosial tetap relevan dan terimplementasi di tengah konteks kehidupan perkotaan yang modern dan dinamis.

3) Pergeseran Nilai Persatuan Dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat

Gotong royong sebagai pengejawantahan nilai-nilai sila ke-3 Pancasila (Persatuan Indonesia) mulai mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan masyarakat urban di Kecamatan Mamuju. Jika sebelumnya kegiatan sosial seperti kerja bakti, arisan, dan gotong royong menjadi bagian penting dari budaya masyarakat, kini hal tersebut semakin jarang dilakukan. Sibuknya aktivitas pekerjaan, perubahan ritme kehidupan perkotaan, dan fokus pada kepentingan pribadi menjadi beberapa alasan mengapa kebersamaan mulai memudar.

(Hidayat, 2021) menyoroti bahwa dalam era modern, terjadi pergeseran nilai-nilai persatuan dan gotong royong akibat derasnya arus individualisme dan globalisasi. Tradisi kebersamaan yang dahulu menjadi pilar utama kehidupan sosial kini semakin terkikis oleh gaya hidup serba cepat dan pragmatis. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan revitalisasi Pancasila sebagai landasan dalam

memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang semakin majemuk dan kompleks.

Perubahan ini tidak sepenuhnya menghilangkan nilai gotong royong, namun bentuknya bertransformasi. Contohnya, praktik gotong royong dalam bentuk tradisional berkurang, tetapi muncul dalam bentuk solidaritas sosial saat terjadi bencana atau musibah. Kehadiran komunitas dan kelompok kecil berdasarkan minat juga menggantikan fungsi gotong royong tradisional, meskipun skalanya lebih terbatas.

Selain itu masyarakat Mamuju dengan keberagaman etnis dan arus pendatang dari berbagai daerah lain di Sulawesi dan luar Sulawesi tentunya memiliki strategi untuk beradaptasi dengan keragaman dengan kegiatan komunitas lintas budaya dan silaturahmi antar kelompok masyarakat. Kebijakan sosial yang berlandaskan Pancasila tetap menjadi instrumen penting untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan memperkuat persatuan dalam keberagaman (Wahyu, 2024)

4) Partisipasi Dalam Musyawarah Mufakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah mufakat merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip Pancasila, khususnya dalam penguatan inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kolektif. Partisipasi semacam ini mendorong keterlibatan semua pihak sehingga keputusan yang di hasilkan mencerminkan aspirasi bersama dan memperkuat interaksi sosial. Musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu nilai dasar Pancasila, masih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat urban Mamuju, terutama dalam konteks komunitas atau forum warga. Namun, pola musyawarah mengalami perubahan dengan adanya pergeseran dari musyawarah langsung ke platform digital dan media sosial.

Sebagai contoh, forum diskusi masyarakat atau kegiatan musyawarah warga kini lebih sering dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp atau media sosial. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih ada, tetapi cenderung lebih rendah karena keterbatasan waktu dan fokus masyarakat pada pekerjaan.

5) Keadilan Sosial Dalam Masyarakat Urban

Urbanisasi mendorong perubahan nilai sosial yang signifikan, namun penerapan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila harus tetap menjadi acuan utama. Keadilan sosial tidak hanya berarti pemerataan ekonomi, tetapi juga mencakup akses yang adil terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat, termasuk di kawasan urban dan rural (Kusuma, 2022).

Pentingnya menjaga prinsip keadilan sosial di tengah perubahan sosial akibat urbanisasi dengan fokus pada pemerataan kesempatan dan perbaikan

layana publik. Keadilan sosial menjadi salah satu tantangan terbesar dalam konteks masyarakat urban. Penelitian menemukan adanya ketimpangan ekonomi yang semakin nyata antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Beberapa program bantuan sosial dari pemerintah berupaya mengatasi ketimpangan ini, namun penerapannya belum sepenuhnya merata.

Sebagai contoh, program bantuan seperti Kartu Prakerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi masih terdapat keluhan mengenai akses dan distribusi yang tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat urban Mamuju masih berupaya mencari keadilan sosial, tetapi masih terdapat hambatan struktural yang perlu diperbaiki.

Selain pergeseran dalam menerapkan nilai Pancasila, Masyarakat urban kecamatan Mamuju menghadapi kendala baik secara internal maupun eksternal. Dalam pembahasan ini menjelaskan kedua jenis kendala ini dengan lebih terperinci guna memahami faktor-faktor penghambat serta tantangan implementasi nilai Pancasila secara efektif yakni:

1. *Kendala Internal*

Kendala secara internal mengacu pada hambatan yang berasal dari masyarakat Kecamatan Mamuju, seperti sikap individu, pola pikir serta keterbatasan dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila. faktor internal ini mempengaruhi bagaimana masyarakat Kecamatan Mamuju mempraktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

a) *Kurangnya Pemahaman Nilai Pancasila*

Sebagian besar masyarakat urban di Mamuju memiliki keterbatasan dalam memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Meski Pancasila diajarkan di sekolah, pemahaman tersebut tidak selalu dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial kurang tercermin dalam aktivitas masyarakat. Kurangnya kegiatan sosialisasi atau edukasi di luar lingkungan pendidikan formal juga berkontribusi pada lemahnya internalisasi nilai-nilai ini.

b) *Individualisme dan Gaya Hidup Modern*

Globalisasi dan arus informasi modern mempercepat adopsi gaya hidup yang lebih materialistis dan berorientasi pada efisiensi, yang sering kali bertentangan dengan esensi Pancasila. Masyarakat urban di Kecamatan Mamuju dalam kehidupannya mulai terpengaruh oleh gaya hidup modern yang cenderung individualis. Fokus mereka adalah memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, serta peningkatan aktivitas ekonomi, membuat masyarakat lebih sibuk dalam pekerjaan dan mengurangi keterlibatan dalam kegiatan sosial yang mencerminkan nilai kerjasama dan gotong royong. Akibatnya, praktik tolong menolong dan kebersamaan sulit teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat urban yang ada di Mamuju.

c) Minimnya Kesadaran sosial dan Musyawarah Mufakat.

Kesadaran sosial yang dimiliki oleh masyarakat kecamatan Mamuju juga mengalami degradasi karena fokus utama mereka adalah peningkatan ekonomi dan kenyamanan pribadi. Hal ini akan berakibat berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial. Kondisi ini terlihat dalam rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti kerja bakti dan musyawarah. Dalam kegiatan musyawarah hanya segelintir masyarakat urban yang berpartisipasi aktif meskipun kegiatan musyawarah tersebut adalah untuk kepentingan bersama.

2. *Kendala eksternal*

Selain faktor internal, terdapat pula kendala eksternal yang mempengaruhi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat urban di Kecamatan Mamuju. Kendala ini muncul dari pengaruh budaya global, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi dan lingkungan fisik. Proses urbanisasi yang cepat membawa dampak pada pola kehidupan masyarakat. Banyaknya pendatang dengan latar belakang budaya dan kebiasaan berbeda membuat masyarakat Mamuju menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan dan gotong royong.

Arus globalisasi juga membawa berbagai nilai dan gaya hidup yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penggunaan media sosial dan teknologi modern juga mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Budaya komsumerisme dan hedonisme yang berkembang menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat, seperti semakin berkurangnya perhatian terhadap sesama dan meningkatnya sikap kompetitif yang tidak sehat.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan munculnya persaingan di antara masyarakat dalam menempatkan pekerjaan dan sumber daya ekonomi, yang mengurangi rasa kebersamaan. Kesenjangan yang mencolok akan muncul antara masyarakat dengan pendapatan tinggi dan rendah. Kondisi ini memunculkan konflik sosial dan menurunkan rasa solidaritas sehingga sebagian masyarakat termarginalkan. Meskipun pemerintah memiliki program untuk mendorong implementasi nilai Pancasila tapi pelaksanaannya kurang maksimal. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila masih terbatas pada acara seremonial dan tidak diikuti dengan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga sarana dan prasarana dan infrastruktur yang disediakan pemerintah seperti taman kota, balai warga dan tempat ibadah tidak selalu tersedia atau terpelihara dengan baik.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran nilai praksis Pancasila di masyarakat urban Kecamatan Mamuju merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, perkembangan teknologi, lingkungan, urbanisasi, individualisme, dan pergeseran nilai Pancasila itu sendiri. Meskipun nilai-nilai tradisional seperti gotong royong mengalami

penurunan, masih ada harapan untuk merevitalisasi nilai-nilai tersebut melalui berbagai upaya kreatif dan kolaboratif. Implementasi nilai Pancasila di Mamuju perlu disesuaikan dengan dinamika masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi dasarnya. Dengan demikian, masyarakat Kecamatan Mamuju dapat tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di tengah arus perubahan zaman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai eksplorasi pergeseran nilai praksis Pancasila di masyarakat urban Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, terdapat sejumlah temuan yang signifikan. Pergeseran nilai ini merupakan hasil dari dinamika internal dan eksternal masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, urbanisasi, globalisasi, serta berbagai tantangan budaya dan ekonomi.

- 1) Pergeseran Nilai Praksis Pancasila. Adanya pergeseran nilai yang di temukan Pada Masyarakat Kecamatan Mamuju terlihat pada perubahan Orientasi masyarakat terhadap kegiatan gotong royong, rasa kekeluargaan dan solidaritas Sosial. Sebagai ibukota dari Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju adalah tempat strategis adanya arus urbanisasi. Dalam masyarakat urban terbentuk kecendruangan interaksi sosial yang individualis dan pragmatis, sehingga mempengaruhi implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- 2) Kendala Internal dan Eksternal Dalam implementasi Nilai Praksis Pancasila. Kendala internal dari masyarakat urban terlihat dari kurangnya pemahaman dan internalisasi mendalam terhadap penerapan nilai Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yakni pelajar dan mahasiswa yang datang ke Mamuju sebagai pendatang untuk melanjutkan pendidikan. Pemahaman yang bersifat teoritis mengenai nilai Pancasila tidak diikuti oleh penerapan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih cenderung fokus pada kebutuhan ekonomi dan mengabaikan nilai-nilai seperti persatuan, toleransi dan keadilan sosial. Tantangan secara eksternal terutama datang dari arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Tidak dapat di pungkiri bahwa masyarakat urban Kecamatan Mamuju banyak terpapar budaya global melalui media sosial dan internet yang secara tidak langsung mempengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka.
- 3) Upaya Implementasi dan Tantangannya. Pemerintah daerah dan Organisasi masyarakat harus terus berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai praksis Pancasila melalui berbagai Program seperti kegiatan Sosial dan edukasi komunitas.

SARAN DAN REKOMENDASI

Implementasi nilai praksis Pancasila di masyarakat urban Kecamatan Mamuju di harapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Pergeseran nilai yang terjadi seiring perkembangan zaman bukan berarti hilangnya nilai Pancasila, tetapi justru membuka peluang untuk mengadaptasi dan mengaplikasikannya dengan cara yang relevan dan kontekstual. Beberapa saran yang sekiranya perlu menjadi pertimbangan untuk memperkuat implementasi nilai praksis Pancasila di masyarakat urban Kecamatan Mamuju yakni:

- 1) Penguatan Pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai nilai Pancasila. Penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan bersinergi untuk memperkuat pendidikan Pancasila secara berkelanjutan, tidak hanya dalam ranah teoritis namun juga aksi nyata dalam bentuk program- program yang terstruktur melibatkan banyak pihak.
- 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial. Dorongan untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas perlu di berikan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Mamuju sebagai ibu kota dari Kabupaten Mamuju.
- 3) Penguatan Peran Pemerintah Setempat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi lokal dan Urban (kerukunan). Pemerintah daerah di harapkan dapat menyusun kebijakan konkret, khususnya di wilayah di wilayah perkotaan dengan masyarakat yang beragam.

Secara keseluruhan, pergeseran nilai praksis Pancasila di masyarakat urban Kecamatan Mamuju merupakan cerminan dari perubahan sosial dan budaya yang terjadi di tengah masyarakat modern. Meskipun nilai-nilai Pancasila mengalami transformasi, masyarakat masih dapat mengadaptasinya dengan cara baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Namun, upaya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila secara utuh membutuhkan sinergi antara berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mengatasi kendala internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairiyah, C. (2020). Value Shift in Urban Communities. *Journal of Urban Studies* 5(2).
- Hidayat, A. (2021). Revitalizing Pancasila in the Modern Era. *Indonesian Journal of Democracy Studies*, 12(2).
- Kaelan, M.S. (2003). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
- Kaharuddin, K., et al. (2024). Embedding Pancasila Values in Early Childhood Education. *Pancasila: Jurnal KeIndonesiaan*.
- Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Kusuma, D.S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mulyana (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdayakarya
- Nugroho, B. A., & Hanita, M. (2021). Implementation of Pancasila Values in Civil Society Participation Against Covid-19. *PUSKAPSI Law Review*, 1(1), 1-12. doi:10.19184/puskapsi.v1i1.23596
- Ritonga, I., et al. (2024). "Efforts to Revitalize Pancasila Values in Building National Character and Global Citizenship." *Jurnal Etika Demokrasi*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wahyu, P. T. (2024). Pancasila sebagai Pilar Kebijakan Sosial. *Pancasila: Jurnal KeIndonesiaan*, 4(2), 146-162.